



MEDIA COVERAGE

ASIA CIVIL SOCIETY CONSULTATION ON NATIONAL SECURITY AND RIGHT TO INFORMATION PRINCIPLES

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- beritasatu.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200

BERITA SATU

Internet adalah Saluran Kebebasan Berekspresi

Rabu, 09 November 2011 | 23:02 WIB

Ilustrasi (sumber: DPA)



"Sangat penting bagi negara berkembang untuk menyediakan akses ke internet bahkan ke kelompok paling miskin dalam populasinya," kata La Rue.

Pembangunan dan pertumbuhan suatu negara sangat erat kaitannya dengan Internet sebagai media yang menyediakan kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi, terutama dalam kaitannya dengan

kebebasan berekspresi bagi warga negara.

Hal ini dikatakan oleh Frank La Rue, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berekspresi, di sela-sela forum konsultasi masyarakat sipil Asia mengenai keamanan nasional dan prinsip-prinsip tentang hak akan informasi yang diadakan di Jakarta, hari ini.

"Saya rasa tidak ada kemungkinan untuk pembangunan tanpa adanya penggunaan Internet," kata La Rue.

Penggunaan Internet adalah penggunaan teknologi baru untuk saluran kebebasan berekspresi.

Terdapat hubungan langsung antara pembangunan, penggunaan teknologi baru, dan kebebasan berekspresi.

Setiap negara wajib menyediakan akses ke Internet dan informasi yang sama untuk semua warga negaranya.

"Sangat penting bagi negara berkembang untuk menyediakan akses ke internet bahkan ke kelompok paling miskin dalam populasinya," kata La Rue, yang kedatangannya di Jakarta bukan dalam kapasitas resmi sebagai Pelapor Khusus PBB.

La Rue sangat menentang ide tentang pembatasan dan kontrol akan arus informasi yang beredar di Internet.

Jika pun hal tersebut harus dilakukan, hanya bisa berdasarkan kasus-kasus tertentu, seperti pornografi anak-anak, kebencian [hate speech], penghasutan untuk genosida, aktivitas kriminal, dan kejahatan terorganisir.

"Hal-hal itulah yang dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk membatasi akses informasi di Internet, karena kasus-kasus itu memenuhi syarat untuk dikaitkan dengan keamanan nasional," kata La Rue.

Bila harus ada pembatasan lain untuk mengakses informasi publik, alasannya harus didefinisikan dengan tepat dan dikonsultasikan ke publik.

Kondisi lain yang memungkinkan akses informasi ditutup, namun untuk sementara, adalah informasi yang berkaitan dengan operasi rahasia, intelijen, dan penyidikan kasus oleh penegak hukum.

"Sangat bisa dimengerti bahwa berkas informasinya tidak dapat dibuka selama proses itu berlangsung karena akan mengacaukan jalannya penyidikan," tambahnya, namun itu tidak berlaku selamanya dan harus dibuka setelah periode waktu tertentu, tergantung pada peraturan dan undang-undang kebebasan informasi publik yang berlaku di suatu negara.

Transparansi informasi mengenai apa yang dilakukan negara dan aparatnya sangat penting untuk meraih kepercayaan masyarakat. Namun untuk itu masyarakat perlu tahu dan percaya bahwa pemerintah berbuat sesuatu untuk kepentingan terbaik masyarakat.

"Untuk membuat masyarakat percaya, mereka harus mempunyai akses terhadap informasi publik," kata La Rue.

Selain dari alasan yang sudah disebutkan sebelumnya, La Rue mengatakan tidak ada alasan bagi pejabat dan badan publik untuk menutupi akses informasi bagi masyarakat.

"Untuk apa informasi [publik] ditutupi selain untuk menjaga impunitas dari tuntutan kriminal atau untuk menutupi kasus korupsi, tidak ada alasan lain," ujar La Rue.

Kebebasan akses informasi publik di Indonesia dijamin dengan adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, yang mulai berlaku sejak 2010 setelah melewati masa sosialisasi dua tahun.

Penulis: Ismira Lutfia/DAS

<http://www.beritasatu.com/nasional/16662-internet-adalah-saluran-kebebasan-berekspresi.html>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- beritasatu.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200

BERITA SATU

Akses Publik Bukan Ancaman Keamanan Nasional

Rabu, 09 November 2011 | 20:03 WIB



HAK UNTUK TAHU. Sejumlah aktivis Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, membentangkan spanduk saat berlangsung aksi memperingati Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) di Semarang, Jateng, Rabu (28/9). Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria, bertujuan untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintah dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia. (sumber:

ANTARA/R. Rekotomo)

"Rakyat punya hak untuk tahu apa yang dilakukan oleh badan dan pejabat negara karena uang merekalah yang digunakan untuk membiayai kegiatan mereka," kata La Rue.

Akses publik terhadap informasi adalah elemen penting untuk keamanan nasional dan bukanlah suatu ancaman.

Dengan akses yang terbuka, publik dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan kelangsungan hajat hidup mereka.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berekspresi, Frank La Rue, mengatakan hal itu di sela-sela forum konsultasi masyarakat sipil Asia mengenai keamanan nasional dan prinsip-prinsip tentang hak akan informasi, yang diselenggarakan di Jakarta.

La Rue mengatakan transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilakukan negara dan pejabat negara harus bisa diakses oleh publik, karena semua itu dilakukan atas nama dan untuk kepentingan publik.

Pembukaan akses untuk informasi itu tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

"Sebaliknya harus dilihat melalui pendekatan keamanan dan pertahanan di bidang kesehatan, pekerjaan, pangan dan kemanusiaan. Lihatlah hal itu dari berbagai perspektif yang beragam," ujar La Rue, yang datang ke Jakarta bukan dalam kapasitas resminya sebagai Pelapor Khusus PBB.

Setiap badan negara harus bisa mengidentifikasi masalah dan mempunyai informasi mengenai proyeksi permasalahan yang akan timbul di bidangnya masing-masing.

"Misalnya seperti yang terjadi di Thailand, bila diprediksikan akan terjadi banjir. Publik punya hak untuk mengetahui informasi itu sebelum banjirnya terjadi," kata Rue.

Penyebaran informasi yang tepat kepada publik, kata La Rue, harus dilakukan dengan cara yang tepat sehingga tidak menciptakan kepanikan masyarakat. Namun untuk membuat mereka lebih mengetahui permasalahan yang akan dihadapinya sehingga bisa mengambil langkah antisipatif yang tepat.

Informasi seperti itu harus dibuka kepada umum karena dapat diasumsikan kegiatan yang dilakukan badan dan pejabat negara dibiayai oleh uang yang dihasilkan dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

"Rakyat punya hak untuk tahu apa yang dilakukan oleh badan dan pejabat negara karena uang merekalah yang digunakan untuk membiayai kegiatan mereka," ujar La Rue.

Transparansi seperti inilah yang menjadi prinsip dasar dalam masyarakat demokrasi agar publik dapat melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh negara.

"Kegiatan negara itu memang bisa saja dilakukan dengan niat yang baik untuk kepentingan publik, namun bisa jadi dengan cara yang salah. Karena itulah kita perlu transparansi untuk bisa mengontrolnya," kata La Rue.

Penulis: Ismira Lutfia/DAS

<http://www.beritasatu.com/nasional/16640-akses-publik-bukan-ancaman-keamanan-nasional.html>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Pedomannews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



Negara Takut Dengan Jejaring Sosial

Rabu, 09 November 2011 16:39

Dibaca: 245



JAKARTA, PedomanNEWS.com – Dengan tumbuh berkembangnya teknologi terutama jejaring sosial membuat beberapa negara ketakutan dan menjadi korban contohnya adalah Mesir dan Suriah. Hal ini disampaikan oleh Pelapor Khusus bidang kebebasan berpendapat PBB, Frank La Rue dalam sebuah diskusi internasional yang bertajuk Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Rabu (09/11/2011) “Teknologi seperti internet saat ini menjadi ketakutan bagi negara, sudah banyak negara menjadi korban dari internet kita bisa lihat Mesir dan Suriah, negara itu bergejolak karena internet,” ujarnya. La Rue juga mengatakan bahwa masih banyak negara di dunia yang menganggap bahwa informasi itu masih disamakan dengan rahasia negara sehingga sangat susah untuk di akses, dan ketika diminta mereka hanya melaporkan hasil itu dengan yang baik-baik tetapi sifatnya hanya formalitas. “Banyak negara yang melaporkan kondisi negaranya tentang hasil yang diraih selama ini tanpa memberikan apa yang terjadi sebenarnya,” ungkapnya.

Rhesa Ivan Lorca

<http://www.pedomannews.com/internasional/berita-internasional/amerika-serikat-a-china/8738-negara-takut-dengan-jejaring-sosial>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Pedomannews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



Intenet Adalah Isu Paling Faktual Di Dunia

Kamis, 10 November 2011 17:43

Dibaca: 218



JAKARTA, PedomanNEWS.com – Perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini seperti internet dan jejaring sosial menjadi isu paling faktual dan penting di dunia saat ini. Hal ini disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB Bidang Kebebasan Berekspresi, Frank La Rue dalam kesimpulan penutup sebuah forum internasional yang bertajuk Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Kamis (10/11/2011)

“Saya terakhir melaporkan adalah tentang kebebasan berekspresi dimana internet adalah salah satu isu di setiap wilayah dunia, jika kita berbicara tentang kebebasan berekspresi selalu terkait dengan teknologi baru,” ungkapnya

La Rue mencontohkan India dimana bahwa negara tersebut sebagai negara teknologi canggih tetapi hanya 7% dari keseluruhan penduduk India yang menikmati teknologi tersebut.

Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles resmi ditutup hari ini dengan menghasilkan beberapa pemikiran tentang akses mendapatkan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding atau acuan di negara masing-masing ketika merumuskan peraturan terkait informasi dan keamanan.

Rhesa Ivan Lorca

<http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/sosial-budaya/8764-intenet-adalah-isu-paling-faktual-di-dunia>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Pedomannews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**



Akses Informasi Di Kamboja Masih Sangat Minim

Kamis, 10 November 2011 05:12

Dibaca: 120



JAKARTA, PedomanNEWS.com – Kebebasan memperoleh informasi yang ada di Kamboja masih sangat minim dan bersifat rahasia berbeda dengan negara yang lebih maju dan demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Son Chhay, anggota Parlemen Kamboja ketika menjadi pembicara dalam diskusi yang bertajuk Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Rabu (09/11/2011)

“Di Kamboja, sama seperti negara-negara komunis lainnya informasi atau akses mendapatkan informasi masih dikategorikan rahasia dan tidak untuk publik,” ujarnya

Son Chhay juga mengatakan bahwa Kamboja bukan negara demokrasi tetapi dalam penerapannya berdasarkan hukum. Ketika disinggung soal sistem media dalam mendapatkan informasi, dirinya mengatakan bahwa media yang ingin memperoleh informasi harus mendapatkan ijin dari pihak terkait.

“Soal media mendapatkan informasi, setiap media yang ingin mendapatkan informasi harus mendapatkan ijin dari pihak terkait,” tambahnya

Rhesa Ivan Lorca

<http://www.pedomannews.com/internasional/berita-internasional/singapura-a-jepang/8741-akses-informasi-di-kamboja-masih-sangat-minim>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Pelitaonline.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200

PelitaOnline.com

Kamis, 10 November 2011

Hak Asasi Manusia

15 Negara Asia Bahas Hak Akses Informasi

Kerahasiaan informasi di sektor keamanan harus didefinisikan lebih ketat sehingga tidak melanggar hak publik atas informasi.

Frank La Rue, pelapor khusus PBB bidang kebebasan berpendapat dan berekspresi turut hadir dalam acara yang diselenggarakan Yayasan Tifa (Sumber: 7medios.com)



Jakarta, PelitaOnline – SEJUMLAH elemen masyarakat sipil yang terdiri dari 15 negara Asia mendorong jaminan hak akses informasi di sektor keamanan nasional.

Bagi mereka, kerahasiaan informasi di sektor keamanan harus didefinisikan lebih ketat sehingga tidak melanggar hak publik atas informasi. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin kebijakan atas keamanan nasional tidak melanggar hak asasi manusia.

"Sebab penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas informasi merupakan hak asasi manusia," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Tri Nugroho kepada *PelitaOnline* di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (10/11).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Forum Asia dan Open Society Foundation (OSF) di Jakarta, Kamis (10/11).

Dan ke-15 negara yang hadir adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Timor Leste, Mongolia, Hongkong, Korea Selatan dan Japan. Disini hadir juga pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang kebebasan berpendapat dan berekspresi, Frank La Rue.

Sebelumnya, sejumlah pertemuan pernah dilaksanakan di berbagai negara. Pada Juni 2011, misalnya, pertemuan serupa pernah berlangsung di Budapest, Hungaria. Selanjutnya, sejumlah pertemuan kembali akan digelar di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Firdaus | Wahyu
dilihat 37 kali.

<http://www.pelitaonline.com/read/politik/nasional/16/9817/15-negara-asia-bahas-hak-akses-informasi/>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- PedomanNews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**



La Rue : Akses Mendapatkan Informasi Bagian Dari Kebebasan Berekspresi

Kamis, 10 November 2011 06:05

Dibaca: 122



JAKARTA, PedomanNEWS.com – Seseorang ingin mendapatkan informasi yang diinginkan adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini disampaikan oleh Pelapor Khusus Bidang Kebebasan PBB-UN Special Report Freedom of Expression, Frank La Rue dalam diskusi internasional Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Rabu (09/11/2011)

“Bagian dari kebebasan berekspresi adalah kebebasan mendapatkan akses informasi,” ungkapnya.

Lanjut La Rue bahwa kebebasan mendapatkan informasi itu adalah tantangan tersendiri bagi negara terutama dalam hal keamanan nasional.

“Tantangan negara adalah saat ini bagaimana kebebasan mendapatkan informasi menjadi tantangan dalam hal keamanan nasional,” ungkapnya.

Rhesa Ivan Lorca

<http://www.pedomannews.com/internasional/berita-internasional/india-a-lainnya/8742-la-rue-akses-mendapatkan-informasi-bagian-dari-kebebasan-berekspresi>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- gatraneews.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



Sandra Coliver: Tiga Aspek Penting Keterbukaan Informasi

Jum'at, 11 November 2011 23:24

[0 Komentar](#)



Jakarta – Open Society Justice Iniyiative (OSJI), Sandra Coliver, mengatakan bahwa ada tiga aspek penting dalam keterbukan informasi dan keamanan di Kawasan Asia. Keterangan itu disampaikan pada diskusi, Asia Civil Society Consultation On National Security and Right to Information Principles, Jumat, (11/11/2011), di warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

"Pertama, Asia tidak punya badan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Padahal, lembaga ini sangat penting, seperti di Amerika Latin, karena tidak ada badan ini, rezim pemerintahan bisa disingkirkan atau diganti," ujarnya.

Kedua, lembaga publik mempunyai tanggung jawab memberikan informasi kepada publik. Namun, banyak perusahaan multinasional yang melanggar keterbukaan informasi sebagai badan publik. "Di Asia, badan informasi publik juga harus mempunyai tanggung jawab yang sama seperti di negara-negara maju," katanya.

Ketiga, keamanan nasional sering menjadi alasan perusahaan atau badan tidak memberika informasi ke publik. Modusnya antara lain, negara atau perusahaan yang mempunyai kontrak dengan perusahaan internasional dilakukan secara rahasia. Padahal ini pelanggaran yang sangat serius karena negara berhak atas aset yang dikelola atas nama publik.

"Kalau publik yang memiliki aset, maka publik harus mempunyai akses informasi," ungkapnya. Menurut Sandra, ada beberapa negara di kawasan Asia yang belum melakukan keterbukaan informasi. Seperti India yang merahasiakan informasi bahaya radiasi nuklir, Pemerintah Mongolia yang merahasiakan peta negara dan tidak boleh melaporkan perkelahian antara dua kelompok karena informasi ini dapat mengganggu ketertiban umum, dan Fakistan yang menyembunyikan penculikan banyak orang.

Pada acara ini, hadir pembicara lainnya, yaitu Executive Director Institute for Defense Security adn Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim, Executive Director Asian Forum for Human Rights and Development FORUM-ASIA) Yap Swee, dan Executive Director Tifa Foundation Tri Nugroho. [IS]

<http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/4608-sandra-coliver-tiga-aspek-penting-keterbukaan-informasi>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Jurnas.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



Cegah Wikileaks Terulang, KIP Akan Atur Korespondensi Politik

Jakarta | 14:55 Fri, 11 Nov 2011

BBC / BBC



Jurnas.com | KOMISI Informasi Pusat (KIP) akan mengatur kembali aturan korespondensi diplomatik di Indonesia. Pengaturan kembali ini menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Bidang Kelembagaan Ahmad Alamsyah Saragih, salah satunya untuk mencegah terulangnya kasus pembocoran dokumen rahasia negara yang dilakukan oleh situs Wikileaks.

"KIP akan mereview kembali korespondensi diplomatik itu yaitu dengan membatasi kerahasiaan korespondensi diplomatik. Ini bagian dari agenda strategis KIP kedepannya," ujar Alamsyah jumpa pers menyoal Konsultasi Regional Keamanan Nasional dan Hak Akses Informasi di Jakarta, Jumat (11/11).

Alamsyah menjelaskan, pengaturan terkait korespondensi politik itu diantaranya dengan mengatur secara lebih spesifik tentang korespondensi yang boleh dibuka ke publik.

"Karena ini menyangkut apakah masuk sebagai rahasia negara atau rahasia pribadi. Tidak semua boleh ditutup informasi dengan alasan ini korespondensi diplomatik. Jadi ada kriteria-kriteria yang kita bikin nantinya," katanya.

Pasalnya sambung Alamsyah, pembocoran yang dilakukan situs Wikileaks beberapa waktu lalu terbukti lebih mengancam kerahasiaan pribadi daripada negara. Ia menilai, tidak ada negara yang runtuh ketahanan nasionalnya akibat Wikileaks.

"Tapi gara-gara Wikileaks ada individu-individu yang tercederai hak pribadinya karena disebut didalamnya," katanya.

Penulis: Aria Triyudha

http://www.iurnas.com/news/44773/Cegah_Wikileaks_Terulang,_KIP_Akan_Atur_Korespondensi_Politik/1/Nasional/Keamanan

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Jurnas.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



KIP: Masyarakat Harus Tahu Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jakarta | 15:27 Fri, 11 Nov 2011



Jurnas.com | KEKAYAAN alam merupakan hak masyarakat luas, karenanya, informasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) harus dibuka secara transparan agar dapat diakses publik. "Soal rahasia negara yang dikecualikan dari transparansi, karena dapat mengganggu keamanan nasional, juga harus diperjelas. Tata cara pengecualiannya, termasuk penyempitan informasi rahasia negara dalam konteks rahasia intelijen,"kata Ketua Komisi Informasi Publik (KIP), Ahmad Alamsyah Siregar di Jakarta, Jumat(10/11).

Menurutnya, aspek rahasia negara yang telah masuk dalam UU Intelijen Negara harus dikaitkan dengan fungsi intelijen. "Hanya sumber daya alam yang terkait dengan fungsi-fungsi intelijen yang boleh dirahasiakan berdasarkan UU intelijen. Diluar itu tidak bisa,"kata Ahmad.

Informasi pengelolaan SDA, kata dia, juga harus dipublikasikan secara berkala. Dia mencontohkan, PT Freeport Indonesia yang mengelola SDA di Papua tidak boleh menutupi Informasi pengelolaan perusahaannya. Pembaruan informasi itu, juga mutlak dilakukan mulai dari profil badan pengelola SDA, struktur, pejabat, laporan keuangan, realisasi anggaran, neraca, arus kas, daftar investasi, dan daftar regulasinya.

Ahmad menjamin, kebebasan ini selama tidak keluar dari limitasi kerahasiaan informasi negara. KIP, tambahnya, akan membantu penyelesaian sengketa informasi terkait dengan dengan rahasia negara. "Penyelesaian penolakan informasi tersebut bisa diselesaikan di KIP," ujarnya.

Penulis: Gema Trisna Yudha

http://www.jurnas.com/news/44777/KIP: Masyarakat_Harus_Tahu_Pengelolaan_Sumber_Daya_Alam/1/Ekonomi

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Jurnas.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**



KIP: Wikileaks Gagal Hancurkan Negara

Jakarta | 14:33 Fri, 11 Nov 2011



Jurnas.com | PEMBOCORAN dokumen kawat rahasia dari berbagai perwakilan Amerika Serikat di dunia oleh Wikileaks ternyata gagal meruntuhkan ketahanan nasional dari negara-negara yang dokumen rahasianya diungkap. "Tidak ada negara yang runtuh ketahanan nasionalnya akibat Wikileaks dan tidak ada satupun presiden dan negara yang hancur dengan Wikileaks membuka dokumen rahasianya." Demikian diungkapkan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Bidang Kelembagaan, Ahmad Alamsyah, dalam jumpa pers menyoyal Konsultasi

Regional Keamanan Nasional dan Hak Akses Informasi di Jakarta, Jumat (11/11).

Alamsyah menilai, pemberitaan Wikileaks lebih mengancam kerahasiaan pribadi daripada kerahasiaan negara. "Jadi lebih kepada pelanggaran hak pribadi atau kerahasiaan pribadi," katanya.

Situs Wikileaks milik Julian Assange tersebut telah membocorkan puluhan dokumen rahasia yang dimiliki sebuah negara atau perusahaan. Salah satu bocoran Wikileaks terkait Indonesia yaitu terkait campur tangan Amerika Serikat (AS) dalam konflik Timor Timur 11 tahun silam.

Penulis: Aria Triyudha

<http://www.jurnas.com/news/44766/KIP: Wikileaks Gagal Hancurkan Negara/1/Nasional/Politik>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Jurnas.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



Kurangi Kolaborasi Pemilik Modal dan Media

Jakarta | 16:17 Fri, 11 Nov 2011



Jurnas.com | SEBAGIAN kalangan menilai kebebasan pers yang berlangsung di Indonesia pascareformasi 1998 silam telah 'kebablasan'. Penilaian tersebut muncul akibat kian seringnya terjadi Trial By The Press. Sebuah ungkapan dimana pers bertindak sebagai pengadil terhadap seseorang dalam suatu peristiwa atau kejadian.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Bidang Kelembagaan Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Trial By The Press terjadi akibat adanya kolaborasi antara pemilik modal

dan media. Untuk itu Alamsyah berpendapat, Trial By The Press dapat dicegah dengan mengurangi kolaborasi pemilik modal dan media yang dimodalinya.

"Kolaborasi modal dan media harus dikurangi. Ini untuk mengurangi *Trial By The Press*," ujar Alamsyah disela jumpa pers mengenai Konsultasi Regional Keamanan Nasional dan Hak Akses Informasi di Jakarta, Jumat (11/11).

Alamsyah juga melihat, Trial By The Press yang berlangsung di Indonesia saat ini kerap berkaitan dengan motif politik. Sehingga menurutnya Trial By The Press biasanya juga disebut Trial By Politic

"Karena berkaitan juga dengan politik," katanya.

Meski begitu tegas Alamsyah, semangat untuk mendorong media di Tanah Air menjadi lebih baik dan profesional juga tak boleh berhenti. Diantaranya dengan menjadikan media sebagai sarana informasi publik.

"Bagaimanapun juga harus didorong agar media di tanah air menuju ke arah yang lebih profesional. Media harus digunakan sebagai sarana publik," katanya.

Penulis: Aria Triyudha

http://www.jurnas.com/news/44789/Kurangi_Kolaborasi_Pemilik_Modal_dan_Media/1/Sosial_Budaya/Obituari

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Jurnas.com**

Section :

Commercial Value :

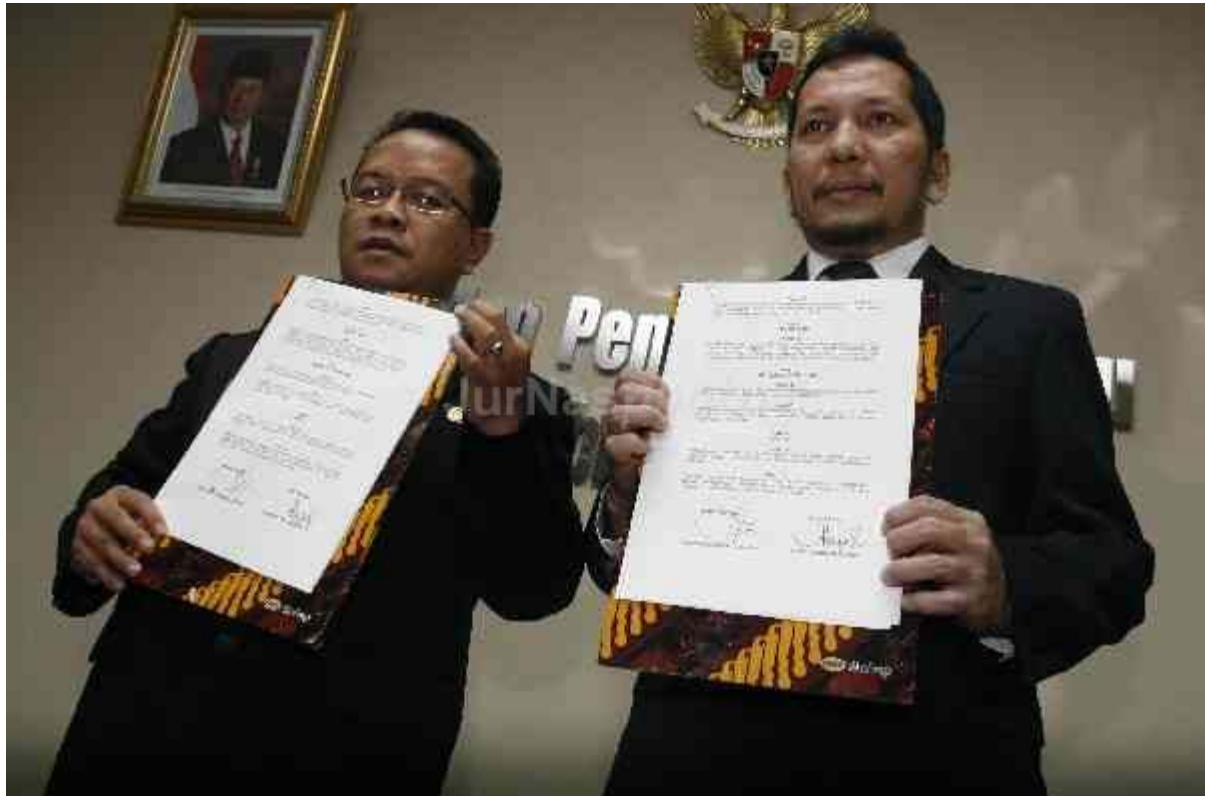
January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



15 Negara Asia Tuntut Hak Akses Informasi Publik

Jakarta | 17:33 Fri, 11 Nov 2011

Wienda Parwitasari / Jurnal Nasional



Jurnas.com | PEMERINTAH di negara-negara Asia dihimbau membuka konsultasi dan mengakomodasi masukan publik untuk mengembangkan sebuah definisi keamanan nasional yang spesifik, bersih dan akuntabel. Himbuan itu merupakan rekomendasi hasil pertemuan dari 15 negara di kawasan Asia yang bertemu di Jakarta guna membahas konsultasi regional menyangkut keamanan nasional dan hak akses informasi pada 9 hingga 10 November 2011 kemarin. "Ketika definisi keamanan terlalu melebar, maka berpeluang membuka penyalahgunaan. Maka untuk mendukung tujuan terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak lainnya, seperti hak akses informasi, pemerintah harus membuka konsultasi dan mengakomodasi masukan dari publik," ujar Direktur Eksekutif *Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS)*, Mufti Makarim, di Jakarta, Jumat (11/11).

Makarim melanjutkan, rekomendasi lainnya yang dikeluarkan dalam pertemuan ke 15 negara Asia tersebut, yaitu keharusan lembaga publik yang bekerja atas badan pemerintah untuk membuka diri kepada masyarakat.

Ke 15 negara Asia tersebut juga mengkritisi perlunya lembaga pengawas tersendiri bagi parlemen.

"Parlemen kerap mewakili masyarakat dalam mengawasi pemerintah, namun harus ada lembaga atau badan untuk mengawasi parlemen," ujar Mufti.

Dikatakan Mufti, lembaga pengawas parlemen tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya kolusi. "Kadang kala parlemen jadi bagian eksekutif juga," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, selain Indonesia, negara lain yang mengirimkan perwakilannya yaitu Bangladesh, Kamboja, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Mongolia, Nepal, Thailand, Timor Leste, Singapura, Korea Selatan Pakistan dan Filipina. Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan organisasi regional di Asia seperti Forum Asia dan Aliansi Pers Asia Tenggara.

Penulis: Aria Triyudha

http://www.jurnas.com/news/44798/15_Negara_Asia_Tuntut_Hak_Akses_Informasi_Publik/1/Nasional

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Jurnas.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



KIP Kaji Informasi Rahasia Negara

Jakarta | 15:45 Fri, 11 Nov 2011

Dini Hariyanti / PT. Media Nusa Pradana



Jurnas.com | KETUA Komisi Informasi Pusat (KIP) Ahmad Alamsyah Siregar mengatakan, rahasia intelijen yang menjadi rahasia negara harus berada dalam fungsi *national security*. Ini harus dilakukan agar perlindungan rahasia negara dalam konteks keamanan tidak justru menciderai hak publik dalam memperoleh informasi.

“Kerahasiaan informasi negara harus diturunkan dari keterbukaan informasi,” kata Ahmad di Jakarta, Jumat (11/11).

KIP akan melakukan kajian untuk membatasi informasi yang menjadi rahasia negara dan yang dapat diakses publik. Menurutnya, fenomena pembocoran dokumen negara oleh wikileaks menjadi bukti bahwa informasi yang dianggap rahasia, ternyata tidak mengancam keamanan negara. “Akan kami kaji apakah mengancam keamanan nasional, atau mengancam hak-hak pribadi individu,”katanya.

Selain itu, terkait dengan pemberlakuan UU Intelijen Negara, KIP akan melakukan kajian agar koridor kerahasiaan informasi yang luas dalam UU tersebut berada hanya pada fungsi intelijen yang khusus. KIP, jelas Ahmad, telah melakukan kerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait informasi intelijen. "Orang yang ingin mendapat informasi intelijen, bisa memintanya ke KIP,"ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) berpendapat, UU intelijen seharusnya mengatur penyelenggaraan intelijen yang profesional. "Bukan soal kerahasiaan. Kerahasiaan informasi negara, yang merupakan informasi intelijen, harusnya diatur dalam UU lain,"jelas Mufti.

Penulis: Gema Trisna Yudha

http://www.jurnas.com/news/44779/KIP_Kaji_Informasi_Rahasia_Negara/1/Nasional/Keamanan

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Jurnas.com**

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



KIP: Rahasia Negara Harus Jamin Hak Publik

Jakarta | 14:00 Fri, 11 Nov 2011

www.komisiinformasi.go.id / www.komisiinformasi.go.id



Jurnas.com | KONSEP perlindungan kerahasiaan negara harus berada dalam koridor yang tidak memasung hak-hak publik. Kerahasiaan informasi negara dalam kerangka National Security harus tetap menjamin hak publik untuk memperoleh informasi.

Komisi Informasi Pusat menyatakan, kerahasiaan informasi negara harus berada dalam jalur perlindungan keamanan yang jelas. "Ada limitasi kerahasiaan negara agar tidak menciderai hak publik, tapi juga tidak mengganggu konsep *national security*," kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Ahmad Alamsyah Siregar di Jakarta, Jumat (11/11).

Dituturkan Ahmad, perlindungan informasi yang menjadi rahasia negara harus melindungi kepentingan yang lebih luas. Namun begitu, kerahasiaan informasi negara harus tetap berada dalam koridor yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Poin lainnya, kerahasiaan negara dilakukan untuk mempertahankan demokrasi dan supremasi hukum.

Menurut Ahmad, hal-hal tersebut harus menjadi parameter dalam penetapan rahasia negara. "Dirahasiakan tapi menciderai HAM, mengganggu penegakan demokrasi, tak boleh dirahasiakan, atau merugikan publik yang lebih luas sehingga terganggu hajat hidupnya, maka tak boleh dikecualikan kerahasiaannya," jelas Ahmad.

Penulis: Gema Trisna Yudha

http://www.jurnas.com/news/44763/KIP:Rahasia_Negara_Harus_Jamin_Hak_Publik/1/Nasional/Hukum

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
-

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



Bocorkan Rahasia Negara, Pers Tak Bisa Dipidanakan

Adi Wicaksono - Okezone

Jum'at, 11 November 2011 15:00 wib

JAKARTA - Pengesahan UU Intelijen dan disusunya UU Rahasia Negara memunculkan kekhawatiran lumpuhnya keterbukaan informasi publik atas nama keamanan nasional. Namun, Komisi Informasi Pusat (KIP) menjamin pers akan tetap mendapat perlindungan hukum khusus.

"Bila publik harus menunggu 7-10 hari untuk meminta data dari suatu institusi, maka pers harus diberi akses dalam 1 x 24 jam. Mereka punya UU sendiri yang *lex specialis*," ucap ketua KIP Ahmad Alamsyah Siregar selepas diskusi bertajuk keterbukaan informasi di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Jumat (11/11/2011).

Konsekuensinya bila sudah mendapatkan data yang diminta, lanjut Alamsyah, pers juga harus tetap menghormati narasumber yang memilih untuk tidak berkomentar. "Kalau *no comment* ya harus dihormati juga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Alamsyah menegaskan masyarakat dan pers tidak dapat dipidanakan dengan alasan menggunakan informasi rahasia negara. Menurut undang-undang, *whistle blower* dilindungi oleh perlindungan saksi.

"UU intelijen harus tetap dipisahkan dengan UU perlindungan saksi. Dalam hal ini, KIP juga menerima konsultasi sengketa penggunaan informasi," tandasnya.

(ful)

<http://news.okezone.com/read/2011/11/11/339/528134/bocorkan-rahasia-negara-pers-tak-bisa-dipidanakan>

Vivanews.com
 Kompas online
 Okezone.com
 Inilah.com

Detik.com
 SWA Online
 SDA-indo.com
 Antara.co.id

Ebizzasia.com
 Disitu.com
 Warta Ekonomi online

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



KIP Siap Buka Kran Informasi Eksploitasi SDA

Adi Wicaksono - Okezone

Jum'at, 11 November 2011 14:16 wib

JAKARTA - Berkaca pada fenomena kasus dugaan gratifikasi PT Freeport terhadap Polri, Komisi Informasi Pusat (KIP) akan terus meningkatkan keterbukaan informasi terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Ketua KIP, Ahmad Alamsyah Siregar menilai terkuaknya kasus "uang saku" Polri dari PT Freeport, tidak lepas dari terbukanya arus informasi kepada publik. Karena itu, pihaknya bertekad akan memasukkan soal keterbukaan informasi ini dalam RUU KIP.

"Kita akan upayakan keterbukaan dalam pengelolaan SDA yang sudah tereksplorasi. Kecuali untuk potensi SDA yang belum tereksplorasi masih dapat dirahasiakan oleh negara," katanya selepas diskusi bertajuk keterbukaan informasi di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (11/11/2011).

Selain pengelolaan SDA, KIP juga akan mengupayakan keterbukaan informasi dalam korespondensi diplomatik. Hal ini menyusul munculnya fenomena situs wikileaks yang aktif membocorkan kawat-kawat diplomatik berbagai negara termasuk Indonesia.

"Wikileaks terbukti tidak dapat meruntuhkan sebuah negara dengan bocoran informasi-informasi diplomatiknya. Selama tidak merugikan privasi individu, ini juga akan kita dorong keterbukaannya," tandasnya.

Lebih lanjut Alamsyah menegaskan, akan mengawal pembuatan RUU Intelijen agar tidak ada klausul-klausul yang membuka potensi interpretasi yang terlalu luas.

"Kita sudah buat rumusan dan guidance agar tidak ada klausul yang melebar," pungkasnya.

(ded)

<http://news.okezone.com/read/2011/11/11/337/528105/kip-siap-buka-kran-informasi-eksploitasi-sda>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Pedomannews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**



Hari Ini, Hasil Pertemuan Regional Konsultasi Keamanan Nasional Diumumkan

Jumat, 11 November 2011 08:08

Dibaca: 50



JAKARTA, PedomanNEWS.com – Pertemuan regional masyarakat sipil tentang keamanan nasional dan hak mendapatkan informasi yang bertajuk Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles telah berakhir pada hari Kamis (10/11/2011) menghasilkan beberapa kesimpulan.

Berdasarkan rilis yang diterima PedomanNEWS.com hasil kesepakatan dan kesimpulan tersebut akan dibacakan dalam konferensi pers yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat (11/11/2011) Pukul 10.00 bertempat di Warung Daun, Kawasan Cikini Jakarta.

Narasumber yang hadir dalam acara ini adalah Ahmad Alamsyah (Komisi Informasi Pusat), Mufti Makarim (IDSPS), Yap Swee Seng (Forum ASIA), Sandra Coliver (Open Society Justice Initiative), dan Tri Nugroho (Yayasan Tifa)

Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles adalah sebuah pemikiran dari berbagai kalangan tentang akses mendapatkan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding atau acuan di negara masing-masing ketika merumuskan peraturan terkait informasi dan keamanan.

Pertemuan ini digagas oleh Yayasan Tifa, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Forum Asia dan Open Society Foundation (OSF).

Rhesa Ivan Lorca

<http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/korupsi-a-ham/8771-hari-ini-hasil-pertemuan-regional-konsultasi-keamanan-nasional-diumumkan>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Pedomannews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200



India Tidak Memiliki Sistem Keamanan Nasional

Jumat, 11 November 2011 07:58

Dibaca: 60



JAKARTA, PedomanNEWS.com – India sebagai negara berpenduduk terbesar nomor 2 didunia ternyata tidak memiliki badan yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Hal ini disampaikan oleh Venkatesh Nayak, salah satu narasumber asal India dalam sebuah diskusi yang bertajuk Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Kamis (10/11/2011)

“Di India ada banyak konflik etnis tetapi negara tidak memiliki sebuah definisi jika terkait dengan keamanan nasional, karena disana aturan tidak dapat dirahasiakan,” ujarnya.

Nayak pun menyatakan bahwa India sebagai negara sepuluh besar dalam bidang ekonomi di dunia juga masih dapat diganggu keamanannya seperti kasus di Mumbai beberapa waktu lalu tetapi tidak seperti yang terjadi di Srilanka.

Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles resmi ditutup pada Kamis (10/11/2011) dengan menghasilkan beberapa pemikiran tentang akses mendapatkan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding atau acuan di negara masing-masing ketika merumuskan peraturan terkait informasi dan keamanan.

Pertemuan ini digagas oleh Yayasan Tifa, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Forum Asia dan Open Society Foundation (OSF)

Rhesa Ivan Lorca

<http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/korupsi-a-ham/8770-india-tidak-memiliki-sistem-keamanan-nasional>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- PedomanNews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**



Alam Bisa Menjadi Celah Bagi Kekaucauan Keamanan Nasional

Jumat, 11 November 2011 15:08

Dibaca: 26



JAKARTA, PedomanNEWS.com- Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia tidak terkait dengan keamanan nasional tetapi keberadaan alam ini bisa beralih fungsi menjadi mall praktek korporasi seperti yang terjadi saat ini.

Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Komisi Informasi RI dalam acara presskon terkait hasil diskusi internasional tentang kebebasan memperoleh informasi di Jakarta Jumat (11/11/2011)

“Sumber daya alam tidak terkait dengan keamanan nasional, tetapi sumber daya alam ini bisa menjadi celah mall praktek korporasi seperti yang sudah ada saat ini,” ujar Ahmad.

Terkait dengan Indonesia sendiri Ahmad mengatakan bahwa Indonesia sendiri sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional sejauh ini perkembangannya sangat positif jika mengaitkan dengan kebebasan memperoleh informasi.

“Indonesia baru mengkonvensi beberapa ratifikasi internasional, ada perkembangan positif seperti contoh pada draft UU selalu memasukkan pasal tentang kebebasan memperoleh informasi,” ungkapnya.

Rhesa Ivan Lorca | Indra

<http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/politik-a-hukum/8775-alam-bisa-menjadi-celah-bagi-kekaucauan-keamanan-nasional>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- PedomanNews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**



Intelijen Asia Lebih Kepada Ancaman Daripada Manfaatnya

Jumat, 11 November 2011 15:12

Dibaca: 48



JAKARTA, PedomanNEWS.com – Keberadaan Intelijen di kawasan Asia lebih kepada ancaman daripada manfaat dalam melindungi warga dari serangan asing.

Hal ini disampaikan oleh Mufti Makarim, Direktur Eksekutif Institute for Defence Security dan Peace Studies (IDSPS) dalam temu wartawan di Warung Daun, Jakarta Jumat (11/11/2011) terkait hasil diskusi internasional yang bertajuk Asia Civil Society Consultation On National Security And Right To Information Principles.

“Fenomena intelijen Asia lebih kepada ancaman daripada manfaat dari macam segala ancaman,” ujarnya.

Mufti Makarim juga memberikan contoh ada beberapa negara Asia yang menggunakan intelijen yang membuat rakyatnya terancam seperti Pakistan lewat operasi militer dan intelijen dalam menjaga serangan dari negara tetangga, Afganistan.

“Kita bisa lihat Pakistan dalam menjaga negaranya dari serangan menggunakan operasi militer dan intelijen yang justru mengancam rakyatnya sendiri,” ungkapnya.

Rhesa Ivan Lorca I Indra

<http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/politik-a-hukum/8777-intelijen-asia-lebih-kepada-ancaman-daripada-manfaatnya>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- PedomanNews.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**



Ahmad Alamsyah : Sebaiknya JK kritik Para Kawan Politiknya

Jumat, 11 November 2011 15:02

Dibaca: 62



JAKARTA, PedomanNEWS.com – Banyak opini yang beredar yang mengatakan bahwa media massa saat ini sudah kebablasan termasuk dari mantan Wapres, Jusuf Kalla ternyata ditanggapi dengan sebaliknya oleh beberapa kalangan.

Anggota Komisi Informasi RI, Ahmad Alamsyah Saragih ketika menjadi pembicara dalam temu wartawan di Warung Daun, Jakarta Jumat (11/11/2011) mengatakan bahwa sebaiknya Jusuf Kalla mengkritik koleganya yang ada di partai politik.

“Saya meminta JK untuk mengkritik teman-teman politiknya,” ujarnya.

Dilain pihak Executive Director TIFA, Tri Nugroho terkait ucapan Jk mengatakan bahwa media saat ini dikuasai oleh beberapa orang dan harus dicermati seperti yang dilakukan oleh dewan pers.

“saat ini, banyak media yang dikuasai oleh beberapa orang dan ini harus dicermati seperti yang dilakukan oleh Dewan Pers,” ujar Tri.

Tri juga menambahkan bahwa sebenarnya bukan hanya media saja yang bablas tetapi partai politik pun saat ini ikut kebablasan juga.

Rhesa Ivan Lorca | Indra

<http://www.pedomannews.com/nasional/berita-nasional/politik-a-hukum/8774-ahmad-alamasyah-sebaiknya-jk-kritik-para-kawan-politiknya>

Vivanews.com
 Kompas online
 Okezone.com
 Inilah.com

Detik.com
 SWA Online
 SDA-indo.com
 Antara.co.id

Ebizzasia.com
 Disitu.com
 Warta Ekonomi online
 Thejakartapost.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**

The Jakarta Post

Friday, November 11, 2011 18:34 PM

National

Activists gather to defend freedom

Ina Parlina, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 11/09/2011 8:25 AM

As one of the largest democracies in Asia, Indonesia has yet to ensure its citizens access to information, with lawmakers and the government devising legislation that may hinder such a right.

The Institute for Defense, Security and Peace Studies' (IDSPS) executive director Mufti Makaarim told The Jakarta Post on Monday that although the country had a freedom of information law, which took effect last year, people were still inhibited from gaining information freely due to red tape or officials' ignorance of the law.

The condition was not improving, he said, as lawmakers and the government were planning to pass a number of bills relating to national security containing articles that could be inimical to freedom, or even perceived as draconian.

The legislation includes the National Security Bill, the State Secret Bill, the Strategic Industry Bill and the Intelligence Law as well as the 2008 Information and Electronic Transaction Law. The Intelligence Law is currently being reviewed by the Constitutional Court.

The ISDPS, along with the Open Society Foundation, Asian Forum for Human Rights and Development (FORUMASIA) and Tifa Foundation, will hold a two-day meeting where members of civil society organizations in the region can gather to discuss the challenges they face in maintaining security without sacrificing freedom of information.

Called the "Asia Civil Society Consultation on National Security and Right to Information Principles", the event will be held on Nov. 9-10.

Civil society representatives and activists from Bangladesh, Cambodia, Malaysia, the Philippines, Thailand, Timor Leste, South Korea will be attending the meeting, though the highlight would be the confirmed attendance of Frank William La Rue, the UN special rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.

Sandra Coliver from the Open Society Justice Initiative (OSJI) and Pos M. Hutabarat from Indonesia's Defense Ministry, are also scheduled to attend the discussion.

Mufti said that the OSJI had been working to establish international principles to serve as a reference for policy makers engaged in drafting or revising related security and information regulations.

He said the principles and the regional consultation event were therefore important for Indonesia, which was now reforming its own national security system.

“The principles and the event itself are important for our democratic transition process. We do not want to put the clock back.”

Mufti said that the Jakarta regional consultation meeting would be a follow-up from the Budapest meeting in Hungary in June. The Budapest gathering recommended continuing research and holding regional consultations to examine the principles under regional circumstances. It is hoped that the principles will be finalized and launched in 2012.

<http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/09/activists-gather-defend-freedom.html>

- Vivanews.com
- Kompas online
- Okezone.com
- Inilah.com

- Detik.com
- SWA Online
- SDA-indo.com
- Antara.co.id

- Ebizzasia.com
- Disitu.com
- Warta Ekonomi online
- Thejakartapost.com

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Year 200**



Friday, November 11, 2011 18:37 PM

National

Blasphemy not a crime: UN official

Bagus BT Saragih, The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 11/11/2011 11:30 AM

Amid various acts of discrimination and the persecution of followers of the Ahmadiyah sect, a UN official says blasphemy should not be categorized as a crime.

Frank William La Rue, the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, said blasphemy may indeed come from someone who disrespects a religion but that this should not be seen as a criminal action.

"I understand that religion, as well as philosophy, is in the world of context of spirituality and concept and idea, and therefore they are open to discussion and debate, which should never be charged with blasphemy law," Frank told *The Jakarta Post* on the sidelines of the Asia Civil Society Consultation on National Security and Right to Information Principles, at a hotel in Jakarta on Thursday.

"I believe in respect, but I don't believe respect can be achieved through censorship," he added. "Europe also has a blasphemy law and I think that is a mistake."

Frank cited article 20 of the International Covenant of Civil and Political Rights, which stipulates that all states should prohibit the incitement to hatred hostility and violence and to any form of discrimination on the basis of race, religion or nationality against anyone.

In Indonesia, the covenant was ratified in 2006.

Several Islam groups have been repeatedly urging for the disbandment of the Ahmadiyah sect in Indonesia, saying it is a deviant sect that is blasphemous against Islam.

Members of the groups insist that the government has the authority to ban Ahmadiyah under the old 1965 Law on Blasphemy.

The sentiment was seen earlier this year in a fatal incident in which an Ahmadiyah sect in Cikeusik, Banten, were brutally attacked by a mob in February, leaving three of its members dead and many others injured. Video recordings of the incident were later distributed online, resulting in a public outcry, however, those responsible for the violence received comparatively light sentences.

In 2008, the leader of the Salamullah (God's Kingdom of Eden) sect, Lia Aminudin, was also detained by police and charged with blasphemy.

In 2010, a number of NGOs concerned with human rights filed for a judicial review at the Constitutional Court, challenging the law against the 1945 Constitution. The petitioners said article 28 of the Constitution guarantees every citizens' religious rights.

The court, however, denied the request and upheld the law.

<http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/11/blasphemy-not-a-crime-un-official.html>

Vivanews.com
 Kompas online
 Okezone.com
 Inilah.com

Detik.com
 SWA Online
 SDA-indo.com
 Antara.co.id

Ebizzasia.com
 Disitu.com
 Warta Ekonomi online

Section :

Commercial Value :

January February March April May June July August September October November December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Year 200

TEMPO|interaktif

Sipil Asia Dorong Jaminan Akses Informasi Keamanan

Jum'at, 11 November 2011 | 10:17 WIB

[Besar](#) [Kecil](#) [Normal](#)

ANTARA/Widodo S. Jusuf



TEMPO *Interaktif*, Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat sipil dari 15 negara se-Asia mendorong jaminan hak akses informasi sektor keamanan nasional. Kerahasiaan informasi di sektor keamanan harus didefinisikan lebih ketat sehingga tak melanggar hak publik atas informasi.

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Tri Nugroho, menyebutkan hal ini diperlukan untuk menjamin kebijakan atas keamanan nasional tak melanggar hak asasi manusia. "Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas informasi merupakan hak asasi manusia," ujar Tri melalui rilis yang diterima *Tempo*, Jumat, 11 November 2011.

Yayasan Tifa adalah salah satu penyelenggara pertemuan regional bertajuk "Asia Civil Society Consultation on the Principles on National Security and Right to Information" di Jakarta, 9 hingga 10 November lalu. Lima belas negara hadir pada pertemuan itu, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Timor Leste, Mongolia, Hongkong, Korea Selatan dan Japan.

Pertemuan juga diikuti pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang kebebasan berpendapat dan berekspresi, Frank La Rue. Tujuannya merumuskan prinsip penting kebijakan hak atas informasi sektor keamanan nasional.

Menurut Tri, beberapa masalah dihadapi terkait hambatan hak akses informasi sektor keamanan. Indonesia, misalnya, menyebutkan adanya UU Intelijen, UU Arsip, RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional yang masih cenderung menghambat hak akses informasi atas nama keamanan nasional.

Meski begitu, Tri menyebutkan Indonesia diapresiasi karena telah mengadopsi UU Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, sejumlah negara masih berjuang agar UU yang menjamin hak akses informasi publik diberlakukan, seperti di Malaysia, Filipina dan Timor Leste.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa, Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Forum Asia dan Open Society Foundation (OSF), tersebut juga bagian dari respon masyarakat sipil se-Asia atas makin luasnya dorongan untuk memprioritaskan hak akses informasi.

"Ada kelompok-kelompok pendukung internasional yang terus berkembang untuk memastikan perimbangan perlindungan hak akses informasi dan keamanan nasional," lanjut Tri Nugroho dalam kata sambutannya.

Sejumlah pertemuan, lanjut Tri, sudah dilakukan di berbagai negara. Pada Juni 2011, misalnya, pertemuan terkait telah berlangsung di Budapest, Hungaria. Sejumlah pertemuan lanjutan akan digelar di negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Hasil pertemuan dua hari ini akan dituangkan menjadi "Principles of National Security and Right to Information". Diharapkan prinsip-prinsip itu nantinya diadopsi dalam aturan regional dan bisa menjadi acuan regulasi bagi negara-negara yang terlibat.

IRA GUSLINA

<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/11/11/brk,20111111-366034,id.html>